

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 61

TAHUN 2008

Presiden: Selesaikan Kisruh Batu Bara

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro untuk segera menyelesaikan kisruh tunggakan royalti perusahaan batu bara sesuai dengan aturan.

"Presiden memberikan arahan agar itu diselesaikan, sesuai aturan-aturan, undang-undang dan peraturan pemerintah," kata Mensesneg Hatta Rajasa di kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut Hatta, Presiden telah memanggil Purnomo beberapa waktu lalu untuk segera menyelesaikan masalah ini, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian, terutama terhadap investasi di sektor batu bara.

Sebelumnya, Depkeu meminta kepada enam perusahaan batu bara yang menunggak pembayaran royalti dalam kurun 2000-2007 senilai Rp 7 triliun untuk segera menyelesaikan tunggakannya tersebut.

Keenam perusahaan tersebut adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT BHP Kendilo Coal Indonesia, PT Berau Coal dan PT Adaro Indonesia. [Ant/N-6]

61

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2008

Belum Ada Kepastian Hukum Pertambangan

[JAKARTA] Iklim investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara nasional belum memiliki kepastian hukum. Akibatnya, tumpang-tindih lahan menjadi permasalahan klasik, yang kerap dihadapi oleh perusahaan pertambangan nasional.

"Masih banyak isu pertambangan, khususnya batu bara, yang belum jelas. Belum ada kepastian, seperti peraturan pemerintah tentang formula harga batu bara, mekanisme royalti apakah untuk bentuk *in kind* atau tidak," ujar Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Jeffrey Mulyono di Jakarta, Rabu (13/8).

Dikatakan, meskipun pemerintah menginginkan perusahaan pertambangan memprioritaskan penjualan batu bara di dalam negeri, hingga sekarang belum ada ketetapan hukum yang mengaturnya.

Karena itu, perlu ada aturan berapa persentase batu bara yang harus disuplai ke pasar domestik

dan dalam harga berapa. Jeffrey mengharapkan, harga domestik batu bara yang ditetapkan adalah harga yang tidak murah, tetapi adil. "Perlu reposisi kebijakan batu bara nasional," katanya.

Sementara itu, Dirjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Bambang Setiawan mengatakan, masih banyak catatan dan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi untuk mendorong serta mengembangkan prospek investasi pertambangan di Indonesia. Di antaranya, penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) Mineral dan Batu Bara agar ada kepastian di bidang pertambangan. Draft Peraturan Menteri tentang Domestic Market Obligation (DMO) segera diselesaikan dalam rangka pengamanan pasokan dalam negeri.

"Perlu sinkronisasi kebijakan lintas sektor antardepartemen terkait dan maupun daerah, terutama yang menyangkut kehutanan, pajak dan nonpajak, serta pungutan daerah, agar dapat segera di-

selesaikan. Perlu dorongan mempercepat infrastruktur jalur transportasi di Sumatera dan Kalimantan dalam rangka mendukung usaha pertambangan," paparnya.

Anggota Pansus RUU Minerba, Mohammad Yasin Kara menyatakan, sudah ada komitmen antara DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Minerba pada bulan ini. DPR akan meminta royalti dinaikkan menjadi 25-30 persen dan diatur dalam keputusan presiden.

"Berkenaan dengan pasal-pasal krusial, sudah ada titik temu, seperti harga mineral dan batu bara dibuat mengikuti kondisi pasar dalam dan luar negeri. Demikian juga masa waktu negosiasi kontrak untuk menyesuaikan dengan UU Minerba yang baru," kata M Yasin.

Kisruh

Sementara itu, kisruh royalti antara enam perusahaan batu bara dan pemerintah memasuki babak baru, yang diperkirakan makin mengganggu iklim investasi.

Mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), tercantum bahwa jika terjadi keterlambatan penyetoran perusahaan, dikenakan denda dua persen per bulan.

Namun, belum jelas apakah pemerintah akan membebani pengusaha dengan denda dua persen tersebut. Pengusaha meminta denda tersebut, tidak dikenakan kepada mereka. "Kami akan lihat mekanismenya seperti apa. Jika pemerintah akan mengenakan denda penunggakan Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB), maka pemerintah juga harus membayar denda *reimbursement*," ujar Bambang Setiawan.

Ditegaskan, baik pemerintah maupun pengusaha akan menghormati kontrak yang ada. Pembayaran *reimbursement* akan dilakukan secepatnya.

Sedangkan Ketua Komite Sumber Daya Mineral Kadin, Herman Afif Kusumo mengatakan, perusahaan-perusahaan mulai mengucurkan dana untuk membayar tunggakan DHPB sejak 2001 hingga 2007 sebesar Rp 7 triliun.

Dia mengatakan, para pengusaha meminta pembayaran dilakukan berta-

hap hingga akhir tahun. Pemerintah diharapkan tidak mengenakan denda penunggakan DHPB.
[DLS/N-6]

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2008



SH/Don Peter

POLEMIC KORUPSI BATU BARA- Dari kiri, Kepala Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas, Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin dan anggota Komisi VII dari Fraksi PAN DPR Alvin Lie (kanan) menjadi pembicara pada diskusi tentang polemik batu bara di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (13/8). ICW menduga adanya praktik korupsi oleh sejumlah perusahaan pertambangan dan tunggakan royalti batu bara kepada negara mencapai Rp 16 triliun.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- G

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2008

SEKILAS BISNIS

Kaltim Nitrate Bangun Pabrik US\$ 550 Juta

■ **JAKARTA**-PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) akan menanam investasi hingga US\$ 550 juta untuk membangun pabrik Ammonium nitrate di Bontang Kalimantan Timur. Ammonium nitrate merupakan bahan baku bahan peledak komersial untuk sektor pertambangan dan penggalian.

Hingga saat ini PT KNI telah mengeluarkan dana US\$ 60 juta untuk pembebasan dan penggarapan lahan, serta pembuatan alat-alat kebutuhan pabrik yang tengah dikerjakan Mann Turbo di Jerman. Demikian diungkapkan Direktur Utama PT KNI Antung Pandoyo, Rabu (13/8).

Pabrik yang akan mulai beroperasi pada awal 2011, lanjutnya, memiliki kapasitas produksi 300.000 ton per tahun. Menurutnya, kapasitas tersebut jauh melebihi kebutuhan Ammonium nitrate di Indonesia saat ini 30.000-40.000 ton. Selama ini untuk menutup kekurangan Ammonium nitrate, Indonesia mengimpor dari AS dan RRC.

"Jika nantinya produksi KNI telah berlebih, akan kita ekspor ke ASEAN, Asia Pasifik, dan Australia Barat," kata Antung. Saat ini 51 persen saham KNI dipegang PT Armindo, sisanya 49 persen oleh Orica Limited. (eff)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- C

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

Pengusaha Batu Bara Didesak Segera Penuhi Kewajiban

Jakarta-DPR mendesak enam perusahaan batu bara segera menyelesaikan pembayaran tunggakan, tidak perlu menunda-nunda. Jika enam perusahaan batu bara terus berkelit dan enggan memenuhi kewajibannya, lebih baik pemerintah segera melakukan pengambilalihan.

Oleh

**NOVAN DWI PUTRANTO
SIGIT WIBOWO**

Keenam perusahaan batu bara nakal itu, antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT BHP Kendilo Coal.

"Mereka boleh saja tidak mau membayar tunggakan tersebut, tetapi pemerintah langsung mengambil alih seluruh aset yang dimiliki," kata anggota Komisi VII Catur Edi di Jakarta, Kamis (14/8). Lebih dari tujuh tahun, keenam perusahaan batu bara itu telah berbuat curang, kenapa ini terus dibiarkan. "Pemerintah jangan sampai tunduk dan menjadi subordinat pengusaha batu bara karena Indonesia bukan milik swasta," tandasnya.

Ia menyatakan pembayaran tunggakan, bunga, dan denda tidak akan membuat mereka bangkrut. "Itu terlalu berlebihan dan mengada-ada serta hanya ingin mengelabui publik," tegasnya. Selama ini perusahaan batu bara mengalami kenaikan harga produksi yang melimpah tetapi mereka tidak memiliki itikad baik menjalankan kewajiban.

Catur menjelaskan jika pemerintah mengambil alih enam perusahaan

batu bara tersebut, PT Bukit Asam atau BUMN lain bisa ditunjuk untuk mengelolanya. Hal ini justru penting untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

Selama ini perusahaan-perusahaan batu bara itu mengekspor 75 persen lebih produksinya. "Inilah yang menimbulkan pasokan batu bara ke pembangkit listrik kurang," tandasnya.

Sementara itu, Alvin Lie mendesak pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk menyelesaikannya secara internal. "Jika permasalahan internal bisa diselesaikan maka posisi pemerintah akan kuat menghadapi pengusaha batu bara yang menunggak royalti," tandasnya. Permasalahan ini mudah diselesaikan jika pemerintah memiliki persepsi sama.

Ia juga meminta presiden bertindak jika kedua menteri tersebut gagal mencapai kesepakatan secepatnya. "Pemerintah tidak perlu menggunakan jasa makelar seperti Kadin dan BKPM dalam menyelesaikan sengketa ini karena hal itu justru akan merusak kewibawaan pemerintah di mata publik," tandasnya. Prinsipnya pengusaha batu bara nakal pasti tunduk dan tidak berani berbuat macam-macam jika pemerintah memiliki ketegasan.

Ketua Masyarakat Pertambangan

Herman Afif Kesumo menyatakan, perusahaan batu bara siap membayarkan tunggakan royalti atau dana bagi hasil produksi (DBHP) sebesar Rp 7 triliun secara bertahap. Pembayaran tersebut diharapkan selesai akhir tahun ini.

Ia mengatakan perusahaan tidak akan sanggup jika harus membayar tunggakan tersebut secara langsung. "Jika harus membayar sekaligus, perusahaan batu bara bisa langsung bangkrut karena tunggakan yang mencapai Rp 7 triliun," kata Herman yang juga merupakan anggota tim negosiasi dengan pemerintah.

Meski demikian, mekanisme pembayaran masih dalam pembahasan antara Kadin dan pemerintah. Menurut Herman, perusahaan sudah memahami bahwa pembayaran Dana Hasil Produksi Batu Bara (DHPB) merupakan kewajiban dan mereka bersedia membayarnya.

Rencananya, pemerintah juga segera menetapkan mekanisme *reimbursement* (pengembalian) kelebihan pajak yang menjadi hak perusahaan batu bara. Namun, mekanisme tersebut masih harus menunggu kepastian besaran yang harus dibayarkan pemerintah. "*Reimbursement* ini masih harus menunggu hasil penghitungan Departemen ESDM dan Departemen Keuangan terkait berapa kelebihan pajak yang sudah dibayarkan perusahaan batu bara," katanya.

Ia juga menambahkan mekanisme pembayaran dan *reimbursement* akan tergantung hasil verifikasi ke ESDM dan Depkeu untuk memastikan mana yang bisa diganti dan mana yang tidak. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 28

TAHUN 2008

Pabrik Baja di Jakarta Utara Diduga Cemari Lingkungan

JAKARTA (SINDO)—Pabrik baja PT Bukit Baja Nusantara, Jalan Agung Karya III Blok C No 10–11 Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diduga mencemari lingkungan. Peralnya, tidak ada izin pengolahan limbah serta fasilitas pengolahan limbah tidak sesuai standar baku mutu.

Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLHD) Jakarta Utara Iswardi Mudahan mengatakan, berdasarkan data sementara, perusahaan baja tersebut menggunakan zat sianida yang berbahaya bagi tubuh dalam mengolah limbahnya. Apabila terhirup tanpa menggunakan alat pengaman, zat tersebut dapat menyebabkan iritasi pada pernapasan dan merusak paru-paru. "Pihak perusahaan juga tidak dapat menunjukkan izin pengolahan lingkungan hidup," kata Iswardi kemarin.

Iswardi menambahkan, hari ini pihak perusahaan diminta datang ke Kantor Wali Kota Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. "Hari ini (kemarin) saya hanya membuat berita acara. Perusahaan masih diizinkan beroperasi, tetapi akan dikenakan sanksi jika pengelola tidak kooperatif," imbuhnya.

Staf PT Bukit Baja Nusantara, Chori, yang diberikan mandat oleh perusahaan untuk menjelaskan permasalahan ini mengatakan, seluruh dokumen berada di kantor pusat di Jalan Jayakarta, Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat. Dia membantah bila perusahaan ini melakukan pencemaran. "Buktinya, hingga saat ini seluruh pekerja yang berada di sini masih dalam keadaan sehat," ujarnya. **(neneng zubaidah)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 26

TAHUN 2008

Awang Bantah Beri Izin PT KPC

SAMARINDA (SINDO) – Bupati Kutai Timur (Kutim), Awang Faroek Ishak membantah telah mengeluarkan izin perluasan areal pertambangan bagi PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pernyataan itu disampaikan Awang menyikapi pengakuan pihak PT KPC di hadapan penyidik Polda Kaltim yang menyatakan telah mendapat izin teknis dari Bupati Kutim dan Departemen Kehutanan (Dephut).

Seperti diketahui, Pemkab Kutim mengadukan pihak perusahaan tambang batu bara tersebut kepada Polda Kaltim karena diduga telah menggunakan sebagian lahan tambang yang dikuasai PT Porodisa Trading tanpa izin. Padahal, kata Awang, untuk mengeluarkan izin atas lahan atau hutan negara harus berdasarkan kajian teknis, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan tata ruang wilayah yang ditentukan Pemkab dan Pemprov.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk melepas sebuah kawasan budi daya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budi daya nonkehutanan (KBNK) memerlukan proses panjang dan rumit serta melibatkan pengkajian dari berbagai instansi. "Jadi, tidak cepat keluar izin untuk perluasan lahan tambang," tukasnya.

Menurut informasi, dalam kesaksian pihak PT KPC kepada penyidik Polda Kaltim menyebutkan, perusahaan

tersebut telah mendapatkan izin perluasan lahan dari Departemen Kehutanan yang melibatkan Dinas Kehutanan (Dishut) Kutim pada 2002–2003. Izin tersebut yang menjadi dasar pihak PT KPC untuk membuka lahan serta melakukan penambangan di atas lahan milik negara yang dikuasai PT Porodisa Trading.

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kutim Zulkifli Syahrudin menyatakan tidak tahu menahu soal izin tersebut. Namun, dia akan mengecek ulang data itu. "Sebab, saya baru menjabat Kadishut Kutim sejak Desember 2006," tuturnya.

Perlu diketahui, Direktorat Reserse dan Kriminal (Dit Reskrim) Polda Kaltim sejauh ini telah memeriksa tiga pejabat perusahaan PT KPC. Ketiga pejabat PT KPC yang diperiksa Satuan III Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Dit Reskrim Polda Kaltim adalah Manajer Eksplorasi KPC Aryo Susatyo, Chief Operating Officer R Utoro, dan Kepala Teknik Tambang PT KPC Iqbal Musawil.

Ketiga pejabat KPC ini didampingi kuasa hukum, di antaranya JP Silalahi dan Nerijs. Namun, se usai pemeriksaan sekitar tujuh jam, ketiganya enggan memberikan komentar kepada para wartawan yang menunggunya di luar ruangan pemeriksaan. Hal yang sama juga dilakukan para penyidik. Pejabat perusahaan tambang dipe-

riksa masih sebagai saksi atas eksploitasi pengelolaan tambang batu bara tanpa izin di atas lahan yang dikuasai PT Porodisa Trading. Aktivitas tambang yang dilakukan PT KPC diduga melanggar Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan g juncto Pasal 78 Ayat 2 dan 6 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Di bagian lain, sekitar 250 karyawan PT KPC kemarin menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat PT KPC Jalan Dr Sutomo Sangatta Baru Kutim, Kalimantan Timur (Kaltim). Aksi damai tersebut merupakan wujud kekhawatiran karyawan KPC terhadap ancaman PHK karena penghentian aktivitas tambang oleh pihak kepolisian.

Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak dan Gas (SPKEP) Kutim Basli Sanggalagi berharap agar PT KPC segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan Pemkab Kutim maupun dengan pihak terkait lainnya. "Kami ini karyawan, punya anak istri, kita takut terkena imbasnya akibat penghentian operasional PT KPC," ujar Basli.

Basli berencana mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. "Kalau memang tak kunjung selesai perkara ini, kami akan mendatangi Kantor DPRD Kutim," tandasnya. (amir syarifudin)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 117

TAHUN 2008

Perusahaan Batu Bara Minta Keringanan Denda

Pemerintah belum menentukan penggantian pajak.

JAKARTA — Pengusaha batu bara berharap pemerintah memberikan keringanan denda akibat menunggak pembayaran royalti. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berupaya agar pengusaha batu bara tidak terkena denda akibat menunggak pembayaran dana hasil penjualan batu bara 13,5 persen.

Ketua Komite Tetap Sumber Daya Mineral Kadin Herman Afif mengatakan pengusaha batu bara telah menandatangani surat kesepakatan membayar tunggakan kepada pemerintah. "Kami menyampaikan permintaan pengusaha kepada pe-

merintah," ujarnya kepada *Tempo* kemarin.

Dalam kontrak karya, kontraktor yang menunggak pembayaran royalti dikenai denda 2 persen per bulan untuk rupiah dan 1 persen untuk dolar Amerika Serikat.

Dia mengatakan ada miskomunikasi antara pengusaha batu bara dan pemerintah tentang pembayaran royalti dan penggantian. Herman menambahkan, sesuai dengan kesepakatan, masing-masing pihak memenuhi kewajiban. Pengusaha membayar royalti, sedangkan pemerintah mengupayakan mekanis-

me *reimbursement* atau klaim pengembalian.

Herman menjelaskan mekanisme pembayaran akan diatur oleh Departemen Keuangan serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam pembayaran tunggakan tersebut, berlaku *self assessment*, yaitu masing-masing perusahaan menghitung sendiri tunggakan yang harus dibayar. Jumlah itu nantinya disampaikan ke departemen terkait. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan terlibat untuk mengaudit akurasi jumlah kewajiban setoran tersebut.

Enam perusahaan masih menunggak pembayaran royalti dengan jumlah keseluruhan Rp 3,9 triliun. Enam perusahaan tersebut adalah PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Berau Coal, PT Kideco Jaya Agung, serta PT Kendilo Coal Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Bambang Setiawan mengatakan mekanisme klaim penggantian masih dalam pembahasan. "Belum ditentukan katanya. Dia mengatakan pemerintah akan menyelesaikan secepat mungkin. ● NIEKE INDRIETTA | GUNANTO ES | ALI NY

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A17

TAHUN 2008

kilas

**PLN Bentuk
Anak Perusahaan
Batu Bara**

JAKARTA — PT PLN (Persero) membentuk anak perusahaan di bidang usaha batu bara, PT PLN Batu Bara. "Direktur utama perusahaan itu Indriarto-no," ujar juru bicara PLN, Ario Subijoko, kemarin.

Perusahaan baru tersebut akan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain atau mengambil alih kuasa pertambangan batu bara. Beberapa perusahaan pemegang kuasa pertambangan sudah mengajukan kerja sama. "Perusahaan itu dari Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan," katanya.

Menurut Ario, perusahaan itu nantinya akan memasok kebutuhan batu bara pembangkit yang dioperasikan PLN. ● AGUNG SEDAYU

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 114

TAHUN 2008

Laporan Keuangan Pemerintah Terganjil Batu Bara

JAKARTA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasion menyatakan tunggakan pembayaran royalti dan pajak perusahaan batu bara merupakan salah satu penyebab laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini *disclaimer* alias tidak bisa diberi pendapat. "Karena itulah harus dibereskan," katanya menjawab *Tempo* di kantornya kemarin.

Menurut sumber *Tempo* di pemerintahan, itu pula penyebab Departemen Keuangan mengambil langkah keras dengan mencekal para pengusaha batu bara agar segera melunasi tunggakan royaltinya. "Supaya laporan keuangan pemerintah tidak *disclaimer* lagi," ujarnya.

Anwar mendukung tindakan pemerintah mencekal beberapa petinggi perusahaan batu bara yang menunggak royalti. BPK pun kini sedang melakukan audit menyeluruh terhadap sektor batu bara.

Mengenai tunggakan pajak batu bara, Anwar mengatakan hal ini juga perlu diaudit. Untuk itu, ia meminta agar auditor BPK diberi akses oleh pemerintah agar lebih leluasa memeriksa pajak.

Audit oleh BPK terhadap

pertambangan batu bara ditekankan pada penghitungan penerimaan negara bukan pajak, bagi hasil, dan pendapatan asli daerah dari sektor batu bara.

Selain itu, pemeriksaan akan dilakukan terhadap kontrak-kontrak perusahaan pertambangan batu bara serta dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi batu bara. Menurut Anwar, pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan pemerintah daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, enam perusahaan batu bara memiliki tunggakan pembayaran royalti Rp 3,9 triliun, yang tak dibayarkan sejak 2001. Direktorat Jenderal Pajak melansir tiga di antaranya memiliki kekurangan bayar pajak Rp 2,5 triliun, yang harus dicicil hingga akhir tahun.

Kepala Subaudit Bidang Perpajakan BPK Novy Palenkahu menyatakan perusahaan batu bara banyak melakukan praktek pengurangan pembayaran pajak. Salah satu caranya adalah menjual batu bara lebih murah daripada harga pasar ke unit usahanya di luar negeri. "Dengan begitu, pembayaran pajak mereka lebih rendah," katanya. ● GUNANTO ES

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Tunggakan Royalti Batubara Dikembalikan ke Kontrak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah tunggakan royalti enam perusahaan pencari batubara akan diselesaikan sesuai dengan kontrak. "Saya kira sudah *clear*. Para pengusaha menginginkan dan pemerintah juga berkehendak begitu, yaitu semua dikembalikan kepada kontraknya," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Pemerintah, menurut dia, akan melihat kembali kontrak karya batubara generasi pertama guna meninjau apa yang telah diputuskan dan bagaimana praktiknya selama ini. "Kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaan kontrak itu, sekarang akan kita benahi," ujarnya.

Menkeu berpendapat semangat dan tujuan pemerintah sebenarnya sama, yaitu melaksanakan kontrak sepenuhnya. "Sekarang, tugas saya membuat mekanisme supaya kontrak itu berjalan penuh," katanya.

Upaya itu, lanjut dia, agar pengusaha memiliki kepastian hukum dan tidak ada kerugian diderita negara. san/* kurnia (D)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

Tren Penurunan Nikel Ancam Prospek Antam

Kinerja PT Aneka Tambang Tbk semester I-2008 merosot menyusul turunnya harga nikel. Sejak Januari sampai Juni 2008, Antam hanya membukukan pendapatan sebesar Rp 5,34 triliun, turun 10 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 yang mencapai Rp 5,96 triliun. Penyebab penurunan tersebut disebabkan menurunnya harga komoditas. Lantas, bagaimana prospek Antam ke depan?

■ **Prayogo P. Harto - NERACA**

PT Aneka Tambang Tbk yang di bursa memakai kode ANTM, merupakan perusahaan tambang milik negara. Antam berdiri pada tahun 1968 dan merupakan perusahaan pertambangan terintegrasi vertikal mulai dari eksplorasi, pengolahan, peleburan dan pemurnian sampai dengan pemasaran. Dengan pengalaman lebih kurang 40 tahun, Antam dikenal sebagai BUMN tambang papan atas dengan produk tambang utamanya feronikel, emas, perak, bauksit, dan pasir besi.

Antam menguasai wilayah cadangan dan sumber daya nikel, bauksit dan pasir besi, yang bisa disebut terbesar di Indonesia ditambah dengan jumlah cadangan emas yang sangat signifikan. Seluruh operasi kegiatan pertambangan Antam tersebar di Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan jumlah cadangan mineral terbesar di dunia, khususnya nikel dan emas.

Beberapa waktu lalu, Antam menjadi perbincangan hangat menyusul persaingannya dengan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) untuk mengakuisisi Herald Resources Limited, perusahaan tambang asal Australia. Kemudian aksi

PROFIL EMITEN

Kode Saham : ANTM
Alamat Kantor : Gedung Aneka Tambang Jl. Letjen TB. Simatupang No. 1 Jakarta 12530
Alamat E-mail : corsec@antam.com
Telepon : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635
Fax : 021-7812822
Website : http://www.antam.com/
Tanggal Listing : 27 Nopember 1997
Papan : Utama
Bisnis Utama : Metal and Mineral Mining
Sektor : MINING
Sub Sektor : METAL AND MINERAL MINING
Corporate Secretary : Bimo Budi Satriyo
E-mail Corsec : bimo.satriyo@antam.com
No. Hp : 0811151840



LISTING INFORMATION

Harga Perdana : Rp 1.400
Modal Dasar : Rp 3.799.999.999.500
Modal Disetor : Rp 953.845.974.500

SHAREHOLDERS

Name	Status	Number of Share	Period	% of Share
Negara Republik Indonesia	Pemegang Saham Pengendali	62.000.000.000.000	12-2007	65%
Ir. Dedi Aditya Sumanagara	Direksi	7.750.000.000	12-2007	0,01%
Masyarakat	Pemegang Saham di Bawah 5%	23.954.500.000.000	12-2007	25,11%

KINERJA ANTM

Nama Akun	2007	2006
Total Asset	12.037.916.922.540,00	7.292.142.246.709,00
Total Kewajiban	3.273.117.500.203,00	3.010.536.835.642,00
Hak Minoritas	1.220.483.844,00	2.935.048,00
Laba Ditahan	5.132.460.443.381,00	1.552.777.306.733,00
Modal Disetor	953.845.975.000,00	953.345.975.000,00
Ekuitas	8.763.578.937.588,00	4.281.602.476.017,00
Pendapatan	12.008.202.498.094,00	5.671.437.658,00
Laba Usaha	6.796.091.534.613,00	2.403.693.612.974,00
Laba Bersih	5.132.460.443.381,00	1.552.777.306.733,00
Laba Bersih Sebelum*	538,08	162,79
Laba Bersih Sesudah*	538,08	162,79
Laporan arus kas dari aktifitas operasi	4.835.907.373.461,00	1.711.300.253.000,00

* Pos Luar Biasa

korporasinya untuk mengakuisisi sejumlah perusahaan tambang. Sebut saja, dua diantaranya, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, tahun 2006 prognosis pendapatan usaha Antam mencapai Rp11,3 triliun. Sedangkan laba bersih Rp5 triliun. Dengan begitu, Antam menjadi BUMN dengan laba bersih terbesar ketiga di bawah Pertamina yang mencatat laba bersih Rp19,9 triliun dan Telkom Rp12,25 triliun. Adapun di 2007, laba bersih ANTAM mencapai Rp5,121 triliun (Rp542,42 per saham). Laba tersebut mengalami lonjakan hingga 230 persen dari Rp1,553 triliun (Rp162,79 per saham) pada tahun 2006. Sementara, penjualan Antam meningkat secara signifikan sebesar 113 persen menjadi Rp12,008 triliun pada 2007, dari Rp5,629 triliun pada 2006. Lantas, bagaimana dengan tahun 2008?

Kinerja Usaha

Hasil kinerja Aneka Tambang sepanjang semester I-2008 terpuak penurunan harga komoditas ferronikel dan bijih nikel. Penurunannya masing-masing mencapai 30% dan 21,46%. Penurunan harga komoditas sangat berpengaruh terhadap hasil ki-

nerja semester I 2008.

Sepanjang semester I-2008, total volume penjualan ferronikel ANTAM sebesar 7.550 ton, naik tipis 3,88% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7.268 ton. Pada triwulan II lalu, total ferronikel yang dijual ANTAM sebanyak 6.283 ton, naik 60,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3.923 ton.

Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi penerimaan keterlambatan penerimaan pengiriman ferronikel ke Eropa pada triwulan I lalu sebanyak 4.708 ton. Triwulan I lalu, volume penjualan ferronikel ANTAM hanya sebesar 1.267 ton, karena adanya keterlambatan penerimaan ekspor ke Eropa sebanyak 4.708 ton.

Dengan kontribusi penerimaan sebesar 4.708 ton tersebut, artinya volume penjualan yang benar-benar dilakukan pada triwulan II sebanyak 1.575 ton dari total 6.283 ton di semester I 2008. Padahal pada triwulan I 2007, volume penjualan ferronikel ANTAM sebanyak 3.923 ton. Rupanya, perbaikan pabrik Ferronikel I (Feni I) menjadi alasannya. Pada triwulan II lalu, ANTAM melakukan perbaikan pabrik Feni I, sehingga produksi sempat terhenti selama 1 bulan.

Mengenai harga yang diterima perseroan, sepanjang semester I lalu, ANTAM menerima harga rata-rata ferronikel sebesar US\$ 12,55/lb, turun 30% dibanding semester I 2007 sebesar US\$ 17,93/lb. Akibat penurunan harga tersebut, meski secara volume penjualan ferronikel naik tipis, ANTAM membukukan penjualan (*revenue*) dari ferronikel sebesar Rp 1,933 triliun, turun 25,48% dari semester I 2007 sebesar Rp 2,594 triliun.

Untuk bijih nikel, sepanjang semester I 2008 ANTAM menjual sebanyak 3,661 juta *weight metric ton* (wmt), turun tipis 6,74% dari semester I 2007 sebanyak 3,926 juta wmt.

Harga rata-rata bijih nikel yang diterima ANTAM di semester I 2008 sebesar US\$ 64/wmt, turun 21,46% dari semester I 2007 sebesar US\$ 81,49/wmt. Dampaknya, perolehan penjualan (*revenue*) dari bijih nikel ANTAM di semester I-2008 sebesar Rp 2,166 triliun, turun 24,97% dari semester I 2007 sebesar Rp 2,887 triliun.

Penurunan harga di dua komoditas utama ANTAM tersebut, menjadi sebab utama penurunan perolehan penjualan sepanjang semester I 2008 sebesar 10% menjadi Rp 5,347 triliun dari sebelumnya Rp 5,961 triliun.

Menurut Corporate Secre-

tary ANTAM, Bimo Budi Satriyo, pengaruh dari penurunan harga nikel dunia relatif besar karena 77% pendapatan Antam berasal dari penjualan nikel, yakni 41% dari bijih nikel dan 36% dari ferronikel.

Adapun penyumbang terbesar ketiga adalah penjualan emas. Sepanjang semester I-2008, volume penjualan emas Antam naik 248% menjadi 3.912 kg. Rata-rata harga jual naik 40 persen menjadi 920 dolar AS per ons. Hal ini dipengaruhi tingginya aktivitas perdagangan logam mulia selama beberapa bulan terakhir.

Peningkatan volume dan harga penjualan itu meningkatkan pendapatan Antam dari emas sebesar 219 persen, menjadi Rp 1,072 triliun, atau sekitar 22 persen dari total pendapatan Antam.

Proyeksi Usaha

Sementara itu, meskipun volume produksi di semester I masih rendah, namun Antam tetap optimis target volume produksi 2008 dapat tercapai. Perseroan menargetkan penjualan ferronikel sebanyak 17 ribu ton, Namun hingga semester I 2008, baru tercapai sebanyak 7.550 ton, atau sekitar 44,41% dari target 2008. Adapun bijih nikel ditargetkan akan terjual 5,8 juta wmt dan emas 3.032 kilogram masih bisa tercapai pada tahun 2008 ini. Walaupun sepanjang semester I belum mencapai 50%, tapi ANTAM optimis hingga akhir 2008 nanti target-target dapat tercapai.

Kinerja ANTAM sendiri kedepan diperkirakan masih

akan meningkat. Pasalnya ANTAM cukup melakukan beberapa proyek kedepan. Salah satu yang terbesar adalah dengan melakukan kerjasama dengan BHP Billiton. Pada juni lalu ANTAM dan BHP Billiton telah melakukan penandatanganan kerjasama usaha patungan (*Joint Venture Agreement-JVA*) dalam melakukan penambangan nikel laterit di Halmahera dan Papua. Nilai investasi dari JVA tersebut diperkirakan sangat besar senilai Rp 36,3 Trilyun. Akan tetapi pihak ANTAM belum bisa mengkonfirmasi nilai proyek tersebut.

Proyek ANTAM yang lain adalah kerja sama dengan PT Krakatau Steel untuk mengembangkan industri baja di Kalimantan Selatan. Bersama dengan Jindal, perusahaan asal India, membangun fasilitas smelter nikel dan stainless steel di Sulawesi Tenggara, kerja sama dengan BHP Billiton untuk mengembangkan deposit nikel di Indonesia bagian timur, dan dengan sebuah perusahaan Jepang memproduksi *chemical alumina* dari bahan baku bauksit.

Meskipun demikian, ANTAM dihadapkan pada persoalan harga nikel yang diperkirakan masih akan turun untuk beberapa tahun ke depan. Menghadapi hal itu, selain menekan biaya produksi dengan menggunakan energi alternatif yang lebih murah, Antam juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan domestik dan asing untuk memproduksi produk bahan baku nikel dan bauksit. ●

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGGKOT

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

Kalau Berbohong, Perusahaan Harus Ditutup

MENURUT kabar, enam perusahaan batu bara membangkang akan membayar tunggakan royalti. Kalau itu benar, berarti mereka patuh dan menghormati negara. Tetapi karena penunggakan itu berindikasi kesengajaan dan sudah berlangsung bertahun-tahun, mereka harus dihukum. Hukuman yang paling sederhana adalah, selain mereka diwajibkan membayar piutang pokok royalti, harus dikenai bunga dan denda.



Bambang Setiawan

Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi ESDM

PEMERINTAH dan pengusaha batu bara hingga saat ini belum menyepakati mekanisme pembayaran tunggakan dana hasil penjualan batu bara (DHPB) dan *reimbursement*. Namun, baik pemerintah maupun pengusaha sepakat penyelesaian persoalan itu tetap mengacu pada klausul perjanjian kontrak perusahaan pertambangan batu bara. Kita ingin penyelesaian secepat mungkin. (Pia/X-5)



Anwar Nasution

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

SEMUA akibat tunggakan royalti harus dibereskan. Kalau ada pengusaha *nunggak* pajak ataupun royalti, *ya* dibayarkan dengan bunganya. Tapi jika mereka punya hak restitusi, *ya* dengan bunganya juga. Saat ini, BPK melakukan audit menyeluruh. Kita senang juga, kita baru meributkan hal itu di koran, pemerintah sudah mendahului untuk menyelesaikan. (DW/X-5)



Deni Daruri

Pengamat ekonomi

PEMERINTAH harus membedakan antara pengusaha yang sengaja berbohong dan yang menunggak. Bagi yang menunggak, cukup dimintai pembayaran beserta bunganya. Tapi yang berbohong, misalnya menggepok data produksi, perusahaannya harus ditutup dan diarahkan bil alih. Pemerintah harus melakukan audit semua perusahaan agar ketahuan mana yang berbohong dan mana yang tidak. (Uud/X-5)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **(15)** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

Pembangkang Royalti Batu Bara Harus Bayar Denda, Bunga

JAKARTA (MI): Kalangan DPR mendesak pemerintah untuk mewajibkan penunggak royalti batu bara membayar denda dan bunga sebab pemerintah sudah kehilangan kesempatan menggunakan dana royalti.

Desakan itu datang dari Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar dan anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo di Jakarta, kemarin. Menurut Harry, besaran denda bisa mencapai 400% dan bunganya 2% per bulan.

Dradjad menambahkan, ada banyak variasi untuk menentukan besarnya suku bunga yang harus dibayar para penunggak royalti itu. Bisa menggunakan besaran suku bunga kredit yang dikenakan perbankan atau menggunakan besaran suku bunga surat utang negara (SUN).

"Intinya pemerintah sudah kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang yang harusnya dimiliki. Pemerintah harus *nombok* AP-BN dengan menerbitkan SUN. Jadi, mereka harus bayar denda sekaligus bunganya," kata Dradjad.

Bila menggunakan asumsi der 400% dan tunggakan Rp7 triliun sejak 2001 hingga 2007, berarti jumlah kewajiban yang harus dibayar pembangkang menjadi Rp28 triliun.

Sesuai dengan kontrak awal perusahaan wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi (royalti) seperti diatur dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan batu bara (PKP2B). Besarnya royalti adalah 13,5% dari total produksi batu bara per tahun.

Jika mengacu pada PKP2B, pemerintah memiliki hak mengenakan denda 2% per bulan atas tunggakan royalti untuk mata uang rupiah dan 1% per bulan untuk mata uang dolar. Bahkan, bila perusahaan tidak mengindahkan surat guran atas tunggakan royalti, Ditjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) dapat memulainya kontrak secara sepihak.

Mulai Ada enam perusahaan pengu



Harry Azhar

Ketua Panitia Anggaran DPR

gak royalti. Perusahaan itu adalah

PT Kideco Jaya Agung dengan jumlah tunggakan royalti Rp448,09 miliar dan US\$ 30,51 juta, PT Kaltim Prima Coal (US\$115,63 juta), PT Kendilo Coal Indonesia (US\$ 6,64 juta), PT Arut-

min Indonesia (US\$68,60 juta), PT Berau Coal (Rp284,28 miliar dan US\$23,82 juta), dan PT Adaro Indonesia (Rp131,70 miliar dan US\$85 juta).

Menurut Harry, umumnya besaran denda dan bunga bisa dinegosiasikan. "Yang pasti, nilai pokok tidak boleh berkurang. Kalau denda dan bunga, boleh dibicarakan lagi. Tergantung kesepakatan, tetapi itu pun harus dilihat ada, tidak, unsur kesengajaan," ujar Harry.

Selain pengenaan denda dan bunga, kata Dradjad, pemerintah diharapkan juga mempelajari tindakan enam perusahaan batu bara tersebut, masuk korupsi atau bukan. Pasalnya, mereka menahan uang negara.

Para pembangkang royalti itu memenuhi panggilan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), kemarin. Menurut Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Herman Afif Kusumo, pertemuan itu hanya meneruskan pembicaraan September tahun lalu.

Saat itu PUPN mengeluarkan surat yang isinya perusahaan diberi waktu 1 x 24 jam untuk melunasi tunggakan royalti.

Apabila tidak ditaati, PUPN dapat mengeluarkan surat pencekalan, penyitaan aset, sampai penjualan aset.

Surat pencekalan sudah dikeluarkan untuk 14 pengusaha. Mereka dicekal sejak 1 Agustus 2008 hingga 27 Januari 2009.

Herman menjelaskan pembayaran tunggakan royalti dimulai pekan ini. Ketika ditanya mengenai denda atau bunga terhadap tunggakan tersebut, Herman mengakui hal itu diisyaratkan dalam peraturan yang ada.

"Tapi kan merupakan hak perusahaan juga meminta keringanan. Bagi kami, yang penting kewajiban pokok perusahaan dipenuhi dulu," tandasnya. (Pia/Uud/Dvd/P-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 30

TAHUN 2008



BERKAH: Otonomi daerah telah membawa berkah tersendiri, antara lain, sumbangan bagi pendapatan daerah. Tampak kegiatan eksploitasi batu bara di sebuah tambang di Kalimantan Selatan.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

Menkeu Kembali ke Kontrak Karya Generasi I

Persoalan dengan para pengusaha batu bara dianggap beres.

JAKARTA—Kisruh di dunia pertambangan batu bara tampaknya akan segera berakhir. Setelah mencapai kata sepakat dalam perundingan yang melibatkan Kadin Indonesia, kemarin pemerintah menegaskan untuk mengembalikan kepada ketentuan dalam kontrak karya generasi pertama.

Penegasan itu disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri, berkenaan dengan kewajiban, baik pemerintah maupun pengusaha pertambangan, pemerintah akan menaati dan kembali kepada ketentuan dalam kontrak karya generasi pertama. Namun lebih jauh, pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap kekurangan dalam penerapan ketentu-

an kontrak tersebut.

"Jadi kita lihat kontrak di generasi pertama. Apa-apa saja yang sudah dituliskan di sana, lalu bagaimana praktiknya selama ini. Kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaan kontrak itu, itulah yang sekarang akan kita benahi," kata Menkeu Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8). Menkeu bahkan menyatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan pengusaha batu bara pun sudah beres. "Pokoknya," kata Sri, "Para pengusaha menginginkan pemerintah. Pemerintah juga memang berkehendak semua dikembalikan pada ketentuan yang ada dalam kontrak." Sri menambahkan, semangat dan tujuan kedua pihak,—pengusaha dan pemerintah, sebenarnya sudah sama.

Dengan keyakinan itu Sri berani menyatakan tugasnya saat ini adalah membuat mekanisme supaya kontrak itu berjalan penuh. Tujuannya tak lain

agar pengusaha memiliki kepastian hukum, sementara negara pun tidak dirugikan.

Setelah sempat bersitegang selama beberapa hari, Selasa (12/8) lalu, baik pemerintah maupun pengusaha batu bara mencapai kesepakatan untuk sama-sama menyelesaikan pembayaran. Para pengusaha batu bara yang sempat menahan dana hasil penjualan batu bara (DHPB) akan melakukan pembayaran, sementara pemerintah pun segera membayarkan *reimbursement* yang menjadi hak pengusaha.

Yang masih tersisa saat itu hanyalah mekanisme pembayaran tunggakan DHPB tersebut. Di sisi pengusaha memang ada keinginan agar pembayaran tunggakan DHPB itu bisa dilakukan bertahap, berkaitan dengan kesimpangsiuran jumlah total tunggakan DHPB.

■ wed/una

79

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

Inco Bangun Pabrik Nikel Pomalaa

JAKARTA — Produsen nikel terbesar, PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco), berencana menginvestasikan 1,1-1,2 miliar dolar AS untuk membangun pabrik pengolah bijih nikel di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Namun pembangunan pabrik masih menunggu izin dari pemerintah.

Direktur Utama Inco, Arif Siregar, mengatakan, pabrik di Pomalaa itu akan mempunyai kapasitas mengolah 30 ribu ton bijih nikel per tahun. "Untuk dananya, kami sudah bicarakan dengan pemegang saham. Namun sekali lagi harus menunggu izin pemerintah," kata Arif usai rapat umum pemegang saham luar biasa Inco, Rabu (13/8) lalu.

Angka 1,2 miliar dolar AS masih merupakan estimasi awal untuk investasi pabrik sehingga kebutuhan bisa saja berbeda. Saat ini pemegang saham Inco belum memutuskan dari mana sumber dana itu akan diperoleh karena jumlahnya yang begitu besar, Rp 11 triliun. Lagi pula izin belum diperoleh.

Proposal izin pembangunan pabrik telah diajukan sejak April 2008. Setelah izin dikanongi, selanjutnya dilakukan proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

80

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (5) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

BATUBARA

**Leighton Incar
Batubara RI**

SYDNEY – Perusahaan teknik dan konstruksi Australia, Leighton Holdings Ltd, menaikkan penjualan sahamnya menjadi US\$ 609 juta atau sekitar Rp 5,58 triliun untuk meningkatkan investasi kontrak tambangnya di Indonesia, India, dan Australia. Leighton menyatakan, dana hasil penjualan saham yang merupakan penjualan saham terbesar keenam di Australia tahun ini akan dipakai untuk menambah investasi di Indonesia, India, dan Australia. *Chief Executive Officer* Leighton Wal King dalam keterangan resmi kepada Bursa Australia di Sydney, Kamis (14/8), memprediksi keuntungan perseroan naik sebesar 15% tahun ini karena harga komoditas berpotensi naik hingga satu dekade ke depan. Masih tingginya permintaan komoditas di pasar global, khususnya bijih besi dan batubara akan mendukung aktivitas kontrak tambang dan sumber daya yang berkaitan dengan peluang usaha perusahaan. Tambang dan eksplorasi sumber alam mencatat 25% dari penjualan Leighton pada tahun yang berakhir 30 Juni, di belakang rekayasa dan infrastruktur sebesar 42%. (c122)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

UTANG DIBAYAR PEKAN INI

Klausul PKP2B Dievaluasi

JAKARTA – Pemerintah akan mengevaluasi kembali sejumlah klausul yang terdapat dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama. Langkah ini diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kontrak karya sehingga pengusaha memiliki kepastian hukum dan negara tidak dirugikan.

“Saya rasa spirit dan tujuannya baik bagi pengusaha batubara maupun pemerintah,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8).

Menkeu memastikan masalah tunggakan royalti enam perusahaan batubara diselesaikan berdasarkan sejumlah klausul yang tertera pada kontrak PKP2B generasi pertama. “Kita lihat kontrak di generasi pertama, apa saja yang tertulis di situ dan praktiknya seperti apa. Kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaan kontrak akan kita benahi,” jelas dia.

Sebelumnya, enam perusahaan pemilik PKP2B generasi pertama menunggak royalti senilai Rp 7 triliun dari 2001-2007. Keenam perusahaan itu adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco

Jaya Agung, PT BHP Kendilo Coal Indonesia, PT Berau Coal, dan PT Adaro Indonesia.

Dibayar

Sementara itu, enam perusahaan tambang diwajibkan membayar utang kepada pemerintah secara bertahap mulai pekan ini. Juru Bicara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Afif Kusumo yang juga ketua tim negosiasi perusahaan tambang batubara mengatakan, besaran utang yang harus dibayar bergantung pada kemampuan masing-masing perusahaan. Namun, mereka harus patuh, membayar dengan baik, bersih, lancar, dan tertib.

Terkait bunga yang muncul akibat menunggaknya pembayaran royalti enam perusahaan, Herman mengatakan, enam perusahaan tersebut akan terkena bunga tambahan. Sesuai ketentuan, bila perusahaan terlambat sebulan membayar royalti terkena bunga 2% untuk mata uang rupiah dan 1% mata uang dolar AS. “Tapi, perusahaan bisa minta keringanan. Bagi kami yang penting mereka memenuhi kewajiban,” jelas Herman. (nov/pya)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2008

Tata Steel Rambah Vietnam

LONDON – Perusahaan baja India Tata Steel menandatangani kesepakatan kerja sama untuk membangun pabrik baja terintegrasi di Vietnam dengan menelan biaya US\$ 5 miliar.

Tata Steel, perusahaan baja terbesar keenam di dunia, mengatakan bahwa mereka akan membangun industri dengan kapasitas produksi 4,5 juta ton dalam tiga tahap dengan Vietnam Steel Corp. (VN Steel) dan Vietnam Cement Industries (Vicem).

Tahun lalu, Vietnam berhasil memproduksi baja 4,2 juta ton, meningkat 10,8% dari 2006. Namun produksi tersebut masih kurang dari 0,5% total produksi tahunan dunia yang mencapai 1,34 juta ton.

VN Steel sekarang merupakan produsen baja paling terkemuka di Vietnam dengan kapasitas produksi sekitar 5 juta ton per tahun. Pabrik baru akan melipatkapasitas produksi tahunan negara yang sekarang masih tercatat sebagai pemain kecil dunia dengan nilai US\$ 800 miliar.

“Pada fase pertama, dalam kompleks pabrik itu akan mendirikan penggiling pendingin dan akan selesai hingga 2010,” bunyi pernyataan perusahaan tersebut seperti dikutip *Reuters*, Rabu, (13/8).

“Kami percaya bahwa kerja sama ini merupakan cara yang tepat untuk menciptakan potensi pertumbuhan Vietnam yang potensial,” kata B Muthuraman, *managing director* Tata Steel.

VN Steel akan menguasai 30% saham di dalam kerja sama baru tersebut, sementara Vicem memegang 5% dan sisanya sebesar 65% dikuasai Tata. (c116)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

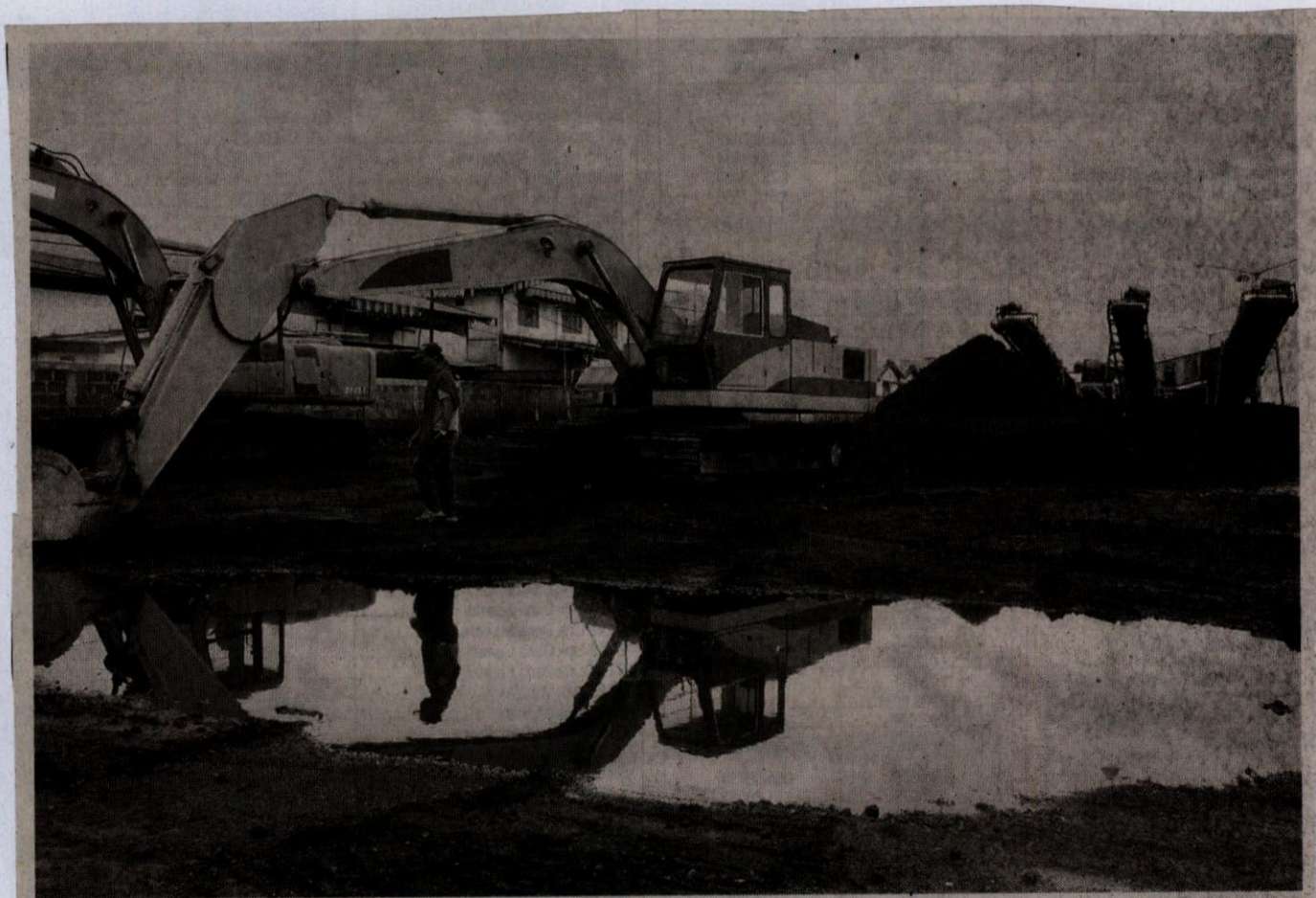
- MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: F10

TAHUN 2008



BISNIS/RAHMATULLAH

HARGA BATU BARA: Seorang pekerja berdiri di dekat tumpukan batu bara di Jakarta yang akan dikirim ke berbagai daerah belum lama ini. Harga kontrak penjualan batu bara antara produsen dan

pedagang hingga akhir tahun akan berkisar US\$90-US\$100 per ton untuk jenis yang sama. Harga di pasar spot diperkirakan 20%-30% lebih tinggi.

28

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: MB

TAHUN 2008

Gubernur baru lanjutkan divestasi

MATARAM: Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) hasil pilkada langsung, 7 Juli 2008 diharapkan melanjutkan perjuangan divestasi saham perusahaan tambang emas dan tembaga yang dikelola PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

"Gubernur baru yang merupakan pilihan rakyat harus melanjutkan perjuangan divestasi itu karena menguntungkan daerah," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Serinata di Mataram, kemarin.

Gubernur NTB periode 2003-2008 itu bersama wakilnya, Thamrin Rayes, akan mengakhiri masa tugasnya tanggal 1 September mendatang.

Sejauh ini Serinata sangat bersikeras agar pemerintah daerah (pemda) memiliki kewenangan dalam pengelolaan perusahaan tambang emas dan tembaga yang dikelola PT NNT di Batu Hijau, Pulau Sumbawa itu.

Dia meminta agar divestasi saham 10% untuk pemda harus terealisasi agar ada kewenangan daerah dalam pengelolaan tambang itu, sehingga terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat.

(ANTARA)

26

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Pemerintah atur mekanisme reimbursement & royalti

OLEH RUDI ARIFFIYANTO & NENENG HERBAWATI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah disebut-sebut segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur mekanisme *reimbursement*, menyusul disepakatinya penyelesaian kisruh royalti batu bara dengan mengembalikan kepada isi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi-1.

"Tadi keenam perusahaan yang tersangkut kisruh royalti batu bara bertemu dengan Dirjen Pajak, dan salah satu kesepakatannya pemerintah segera mengeluarkan Permenkeu untuk mengatur mekanisme *reimbursement*," kata pengusaha batu bara yang enggan disebut namanya.

Keenam perusahaan itu adalah PT Kideco Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, dan PT Adaro Indonesia.

Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia untuk Sumber Daya Mineral Herman Afif Kusumo, mengatakan keenam perusahaan itu kemarin juga dipanggil Direktorat Kekayaan Negara. "Pertemuan di kantor Pak Hadiyanto, mereka dipanggil satu-satu mungkin ditanya. Sudah ada kesepakatan tapi saya tidak tahu detailnya seperti apa," katanya kemarin.

Herman mengatakan pengusaha berkomitmen untuk melakukan pembayaran royalti dengan catatan tidak akan mengganggu aliran kas perusahaan. "Di sisi lain, perusahaan mendapat jaminan dari pemerintah kalau ada apa-apa, yang itu perlu ada penggantian, akan diurus oleh pemerintah. Jadi, *case close*," katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan membenahi beberapa aturan jika terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

"Saya rasa spirit dan tujuan baik dari para pengusaha maupun pemerintah sama. Sekarang saya tugasnya adalah membuat mekanisme supaya kontrak itu berjalan penuh, pengusaha memiliki kepastian hukum dan negara tidak ada yang dirugikan," katanya kemarin.

(DIENA LESTARI/RATNA ARIYANTI)(rudi.arifiyanto@bisnis.co.id & neneng.herbawati@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 72

TAHUN 2008

Akselerasi

Mittal & Hunan Valin jalin aliansi

SHANGHAI: ArcelorMittal, produsen baja terbesar di dunia, menjalin aliansi dengan Hunan Valin Iron & Steel Group, produsen baja asal China, untuk mendirikan pabrik senilai 6,5 miliar yuan (US\$948 juta).

Manajemen Hunan Valin Steel Tube & Wire Co, unit usaha Hunan Valin Group, menyatakan dalam kerja sama ini ArcelorMittal akan melakukan transfer teknologi produksi baja silikon.

Dalam aliansi itu, Hunan Valin Steel Tube & Wire berperan sebagai pemasok *hot-rolled sheets* ke pabrik patungan tersebut yang diperkirakan mencapai 600.000 ton per tahun.

ArcelorMittal saat ini menguasai 23,7% saham Hunan Valin Steel Tube & Wire. (BLOOMBERG/SMU)

87

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: P1

TAHUN 2008

Wika investasi US\$160 juta untuk kontraktor tambang

Oleh BAMBANG P. JATMIKO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: BUMN konstruksi PT Wijaya Karya Tbk (Wika) menyiapkan pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*) yang bergerak di bidang kontraktor tambang dengan proyeksi kebutuhan investasi mencapai US\$160 juta (atau sekitar Rp1,4 triliun).

Direktur Keuangan Wika Ganda Kusuma mengatakan untuk tahap pertama perseoran akan membeli dua set alat pertambangan senilai total US\$160 juta. Sumber dana pembelian alat ini berasal dari internal maupun eksternal.

"Untuk pendanaannya kami belum membahas secara detail. Namun untuk tahap pertama kami paling tidak akan membeli dua set alat untuk mendukung bisnis kontraktor pertambangan ini," katanya baru-baru ini.

Dia menilai bisnis sektor pertambangan masih prospektif, sehingga lini bisnis kontraktor pertambangan bisa memberi nilai tambah bagi perseoran.

Wika akan membentuk perusahaan *joint venture* yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan lantaran rencana untuk mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang tersebut gagal.

Perseoran membatalkan rencana akuisisi itu lantaran harga akuisisi kontraktor tambang dinilai terlalu mahal.

Perusahaan *joint venture* yang akan dibentuk itu rencananya diintegrasikan dengan bisnis perseoran yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Saat ini perseoran lewat anak perusahaannya, PT Wika Intrade, menjalankan bisnis jual beli komoditas tersebut.

28

Dalam kesempatan itu Ganda mengatakan bahwa perseoran baru saja memperoleh kontrak senilai Rp100 miliar dari PT Swakarsa Sinar Sentosa untuk pembangunan infrastruktur perkebunan kelapa sawit.

Ganda mengatakan infrastruktur yang akan dibangun itu mencakup jalan serta angkutan komoditas kelapa sawit. Pembangunan akan memakan waktu sekitar setengah tahun hingga satu tahun.

"Kontrak itu baru saja kami dapat, dan dalam waktu dekat ini pembangunan akan dimulai. Kami optimistis hingga akhir tahun nilai kontrak bisa mencapai target yaitu di kisaran Rp14 triliun," katanya.

Total kontrak

Total kontrak proyek yang telah diraih Wika mencapai Rp10,5 triliun, dari target akhir tahun ini sebesar Rp14 triliun.

Dari belanja modal yang dialokasikan perseroan tahun ini sebesar Rp750 miliar, hingga 30 Juni lalu, terserap sekitar 50%.

Untuk alokasi belanja modal sektor proyek pembangkit listrik sebesar Rp150 miliar telah terserap semuanya. Dana yang dialokasikan untuk pengembangan usaha *engineering procurement construction* dan proyek luar negeri sebesar Rp300 miliar terserap Rp210 miliar.

Selama enam bulan pertama tahun ini, pendapatan Wika mencapai Rp2,73 triliun, dan laba bersih Rp61,8 miliar.

Harga saham Wika kemarin ditutup menguat 1,49% menjadi Rp340 dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya sebesar Rp335. Dengan mengacu pada harga saham ini, nilai kapitalisasi pasar Wika mencapai Rp1,98 triliun.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Menkeu: Tunggakan Royalti Diselesaikan Sesuai Kontrak Investor Bursa Respons Positif Pernyataan Presiden

Jakarta, Probisnis RM.

Langkah Presiden SBY yang meminta tunggakan royalti pengusaha batu bara diselesaikan secara hukum akhirnya berimbas positif ke lantai bursa. Kondisi ini makin membaik menyusul pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan bahwa persoalan royalti akan diselesaikan sesuai kontrak.

"Saya kira sudah clear. Para pengusaha menginginkan dan pemerintah juga berkehendak begitu, yaitu semua dikembalikan kepada kontraknya," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah akan

melihat kembali kontrak karya batu bara generasi pertama guna meninjau apa yang telah diputuskan dan bagaimana praktiknya selama ini. "Kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaan kontrak itu, sekarang akan kita benahi," ujarnya.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin melaju cepat di tengah tipisnya nilai transaksi saham. Saham-saham pertambangan, energi dan komoditas terus menguat.

Pada penutupan perdagangan saham, kemarin IHSG naik 43,121 poin (2,09 persen) menjadi 2.106,642. Indeks LQ-45 naik 10,761 poin (2,54 persen) menjadi

433,766 dan Jakarta Islamic Index (JII) naik 12,418 poin (3,75 persen) menjadi 343,181.

Perdagangan saham mencatat transaksi sebanyak 58.927 kali, dengan volume 2,567 miliar unit saham senilai Rp 3,380 triliun. Sebanyak 139 saham naik, 52 saham turun dan 139 saham stagnan.

Saham-saham yang naik harganya antara lain, Bumi Resources (BUMI) naik Rp 400 menjadi Rp 5.400, Astra Agro Lestari (AALI) naik Rp 1.700 menjadi Rp 17.700, PP London Sumatra (LSIP) naik Rp 350 menjadi Rp 6.450, Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) naik Rp 1.500 menjadi Rp 13.650 dan Indo Tambangraya Megah (ITMG) naik Rp 1.300 menjadi Rp 24.050, Telkom (TLKM) naik Rp 50 menjadi Rp 7.450, Antam (ANTM) naik Rp 60 menjadi Rp 1.910.

Sementara analisis bursa dari Bhakti Investama Budi Ruseno menilai, kenaikan kembali harga minyak dunia jadi pendorong utama aktifitas saham-saham energi.

Menurutnya kebijakan pemerintah ikut mempengaruhi kondisi bursa. Sejak munculnya pengekalan terkait royalti, pelaku pasar telah mengantisipasi dengan penjualan saham energi. "Pernyataan SBY ikut menggairahkan pasar," ujarnya. ■ DNA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
---	--

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
--	--	---

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEP		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 4 TAHUN 2008

BA to acquire a coal mine

JAKARTA: Publicly listed coal mining company PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) says it has reached an agreement to buy half of a coal concession in Kalimantan worth US\$17.85 million.

PTBA said that it would buy a 51 percent share in PT International Prima Coal (IPC) as part of an effort to boost its coal production, PTBA's Corporate Secretary Eko Budhiwijayanto said, in a statement published Thursday. It would use internal funding to finance the acquisition, he said.

Eko said that IPC owned the right to mine, process and sell coal in an area in East Kalimantan until 2016. The area has coal reserves of 45 million tons. — JP

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2008

Leighton to sell A\$700 million shares to expand

Madelene Pearson

Bloomberg/Melbourne

Leighton Holdings Ltd., Australia's largest engineering and construction company, plans to raise A\$700 million (US\$609 million) selling shares to expand contract mining in India, Indonesia and Australia.

Leighton, which gets about a quarter of its sales operating mines for companies such as BHP Billiton Ltd., will sell stock to existing investors at A\$35.35 a share, 17 percent

less than its close Wednesday, the Sydney-based company said in a statement.

Chief Executive Officer Wal King, 64, forecast profit will rise at least 15 percent this year as a resources boom continues into the next decade. Demand for coal and iron ore sent prices to records this year, encouraging investment in new mines in Asia.

"The upside is very strong indeed," said Peter Russell, head of research at brokerage Intersuisse Ltd. who rates the stock a "buy". "Demand for

commodities is not suddenly going to decrease."

Leighton, halted from trading pending the sale, fell 5.3 percent to A\$42.36 Wednesday. The stock has fallen 31 percent this year compared with a 21 percent drop in the benchmark index.

Leighton said it will use the money to invest in plant and equipment in Indonesia, Australia and India. The share sale will be the sixth largest in Australia this year according to data compiled by Bloomberg.

Indonesia is the second biggest coal exporter after Australia. India is the No. 3 iron exporter behind Brazil and Australia.

"Strong demand for global commodities, particularly iron ore and coal, continues to support contract mining activity and resources-related opportunities for the group," the company said Thursday in the statement to the exchange.

Mining and resources generated 25 percent of Leighton's sales in the year ended June 30, behind engi-

neering and infrastructure's 42 percent share.

Demand for infrastructure projects in Australia helped underpin a 35 percent gain in 2008 full-year net income to a record A\$607.33 million, Leighton said Thursday in a separate statement. The result compared with the A\$613.4 million median estimate of five analysts surveyed by Bloomberg news before Thursday.

Sales rose 22 percent to A\$14.5 billion in 2008, it said. Sales in 2009 are expected to

rise 15 percent and more than 10 percent the following year, Leighton said Thursday.

The share sale is being managed by ABN Amro Holding NV and Macquarie Group Ltd. Funds raised from the share sale will also be used to buy back debt, Leighton said.

"Now is a good time to raise equities rather than debt," Intersuisse's Russell said.

Leighton's work in hand was A\$30.3 billion as at June 30, compared with A\$21.1 billion a year earlier, the company said.